



# DAFTAR ISI

PENGANTAR — iii

DAFTAR ISI — vii

<b>BAB I</b>	<b>SELYANG PANDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>— 1</b>
	A. Supremasi Sistem Hukum	— 1
	B. Pembentukan Hukum	— 3
	C. Pembentukan Perundang-undangan	— 5
	D. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	— 8
	F. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	— 11
	G. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah	— 15
<b>BAB II</b>	<b>FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA OLEH DPRD</b>	<b>— 17</b>
	A. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	— 17
	B. Dasar Hukum Fungsi Pembentukan Perda oleh DPRD	— 20
	C. Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh DPRD	— 22

<b>BAB III</b>	<b>KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERDA</b>	<b>— 25</b>
	A. Persiapan Merancang Perda	— 25
	B. Kedudukan Perda dalam Otonomi Daerah	— 27
	C. Fungsi Perda Sesuai Peraturan Perundang-undangan	— 30
	D. Materi Muatan dalam Perda	— 31
<b>BAB IV</b>	<b>ASPEK, LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP PEMBENTUKAN PERDA</b>	<b>— 35</b>
	A. Aspek Pembentukan Perda	— 35
	B. Landasan Pembentukan Perda	— 37
	C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	— 41
	D. Prinsip Dasar dalam Pembentukan Perda	— 43
<b>BAB V</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN PERDA</b>	<b>— 49</b>
	A. Perencanaan RaPerda	— 50
	B. Penyusunan RaPerda	— 58
	C. Pembahasan RaPerda	— 62
	D. Penetapan dan pengesahan Perda	— 65
<b>BAB VI</b>	<b>TEKNIK PENYUSUNAN PERDA</b>	<b>— 69</b>
	A. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	— 69
	B. Kerangka Sistematika Perda	— 71
	C. Kegunaan Bahasa Hukum dalam Pembentukan RaPerda	— 80
<b>BAB VII</b>	<b>NASKAH AKADEMIK</b>	<b>— 87</b>
	A. Perda yang Baik Memerlukan Naskah Akademik	— 87
	B. Fungsi Naskah Akademik	— 91
	C. Peran DPRD dalam Penyusunan Naskah Akademik	— 92
	D. Substansi Penyusunan Naskah Akademik	— 94
	E. Sistematika Penyusunan Naskah Akademik Perda	— 96

**BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKSESIBILITAS PUBLIK  
DALAM PROSES PENYUSUNAN PERDA — 107**

- A. Partisipasi Masyarakat dalam  
Penyusunan Perda — 108
- B. Aksesibilitas Publik dalam Proses  
Penyusunan Perda — 112
- C. Konsultasi Publik — 115

**BAB IX IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN METODE ANALISIS  
DALAM PENYUSUNAN PERDA — 119**

- A. Identifikasi Permasalahan — 119
- B. Metode *ROCCIPI* (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*) — 122
- C. Metode *Fishbone* — 125
- D. Metode *RIA* (*Regulatory Impact Assessment*) — 126
- E. Metode *Regulatory Mapping* (*RegMap*) — 129

**BAB X PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK — 131**

- A. Pengintegrasian Pembangunan Berkelanjutan  
Berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik — 131
- B. Parameter Prinsip *GSDG* — 134

**BAB XI CONTOH PENYUSUNAN PERDA INISIATIF  
PEMERINTAH DAERAH — 149**

- A. Penyusunan Perda tentang *APBD* — 150
- B. Penyusunan Perda tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah — 159
- C. Penyusunan Perda tentang Rencana  
Tata Ruang Daerah — 167
- D. Penyusunan Perda tentang Pembentukan  
Organisasi Perangkat Daerah — 177

<b>BAB XII</b>	<b>EVALUASI RAPERDA, PEMBATALAN, PENYEBARLUASAN DAN PENEGAKAN PERDA</b>	<b>— 189</b>
A.	Evaluasi RaPerda	— 189
B.	Pembatalan Perda	— 190
C.	Penyebarluasan Pembentukan Perda	— 193
D.	Penegakan Perda	— 194
E.	Pejabat Penyidik	— 195
<b>BAB XIII</b>	<b>KELEMAHAN PEMBENTUKAN PERDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI DPRD</b>	<b>— 197</b>
A.	Kelemahan Fungsi Pembentukan Perda oleh DPRD	— 197
B.	Peningkatan Kapasitas Fungsi DPRD	— 204
<b>BAB XIV</b>	<b>IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERDA DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA OLEH DPRD</b>	<b>— 209</b>
A.	Implementasi Pelaksanaan Perda oleh Pemerintah Daerah	— 209
B.	Pengawasan Pelaksanaan Perda oleh DPRD	— 212
<b>BAB XV</b>	<b>PUBLIK REVIEW TERHADAP PERDA BERMASALAH</b>	<b>— 225</b>
A.	Perda Bermasalah dan Perlunya <i>Publik Review</i>	— 225
B.	Penyebab Perda Bermasalah	— 228
C.	Peran Serta Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik	— 231
<b>GLOSARIUM</b>		<b>— 233</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>— 235</b>
<b>INDEKS</b>		<b>— 239</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>		<b>— 241</b>